



**LAPORAN  
PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI STUNTING  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2022**

**DISAMPAIKAN OLEH :  
BAPPEDA KAB. KEPULAUAN MENTAWAI**

***TUAPEDAT, 30 MEI 2023***

## GAMBARAN UMUM DAERAH

- ✓ Luas wilayah darat : 6.011,35 Km<sup>2</sup>/601.135 Ha (14,3 % dari Total Wil. Sumbar)
- ✓ Kab/Kota Terluas di Prop. Sumatera Barat
- ✓ Luas perairan laut : 10.099,152 Km<sup>2</sup>

Jumlah Pulau 99 buah

Lingkup wilayah

- ✓ 10 kecamatan
- ✓ 43 desa
- ✓ 354 dusun

Kawasan Hutan seluas 491.918 ha (81,83%)

Areal Penggunaan Lainnya 109,217 ha (18,17%)

33 Desa (76,74 %) Merupakan Desa Pesisir

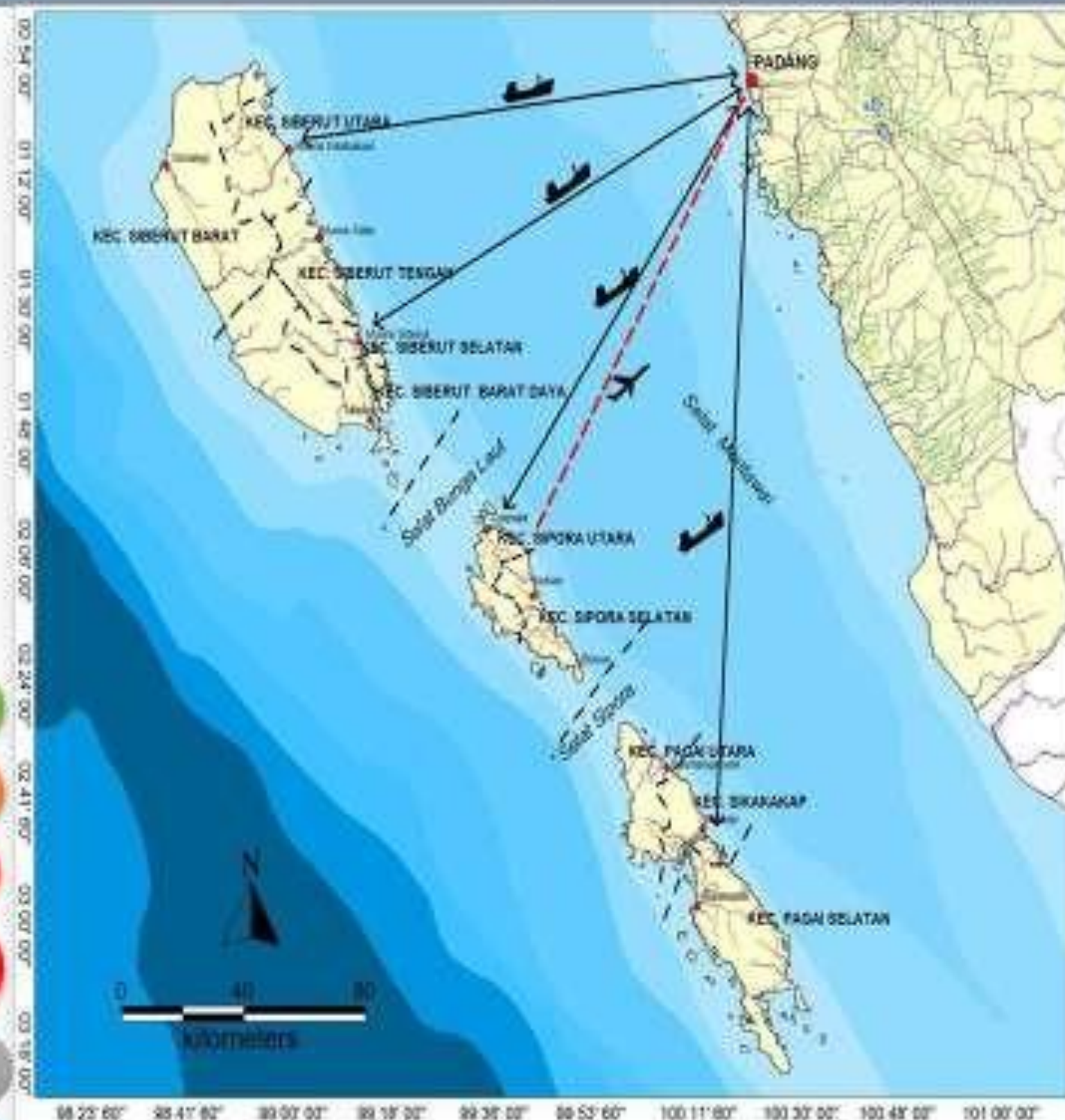
Panjang Garis Pantai : 1402,66 km

Satu2nya Kategori Daerah 3T (PerPres Nomor 63 Tahun 2020)

Wilayah dilewati Lempeng Indo-Australia  
(Rawan Gempa dan tsunami)

Jumlah Desa Mandiri (3), Maju (5), Berkembang (22), Tertinggal (13)

Luas Terumbu Karang : 21.220 hektar



Jarak tempuh Tuapejat-Padang : 95 Mil

## SIBERUT



- Luas Wilayah : 3.877,9 km<sup>2</sup>
- Memiliki 5 Kecamatan
- 20 Desa, dan 203 Dusun
- Jumlah Penduduk : 40.220 jiwa
- Rata2Kepadatan Penduduk : 13,3 orang/km<sup>2</sup>
- Pulau Siberut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- Taman Nasional Siberut (TNS) sebagai Kawasan Cagar Biosfer Dunia

## SIPORA



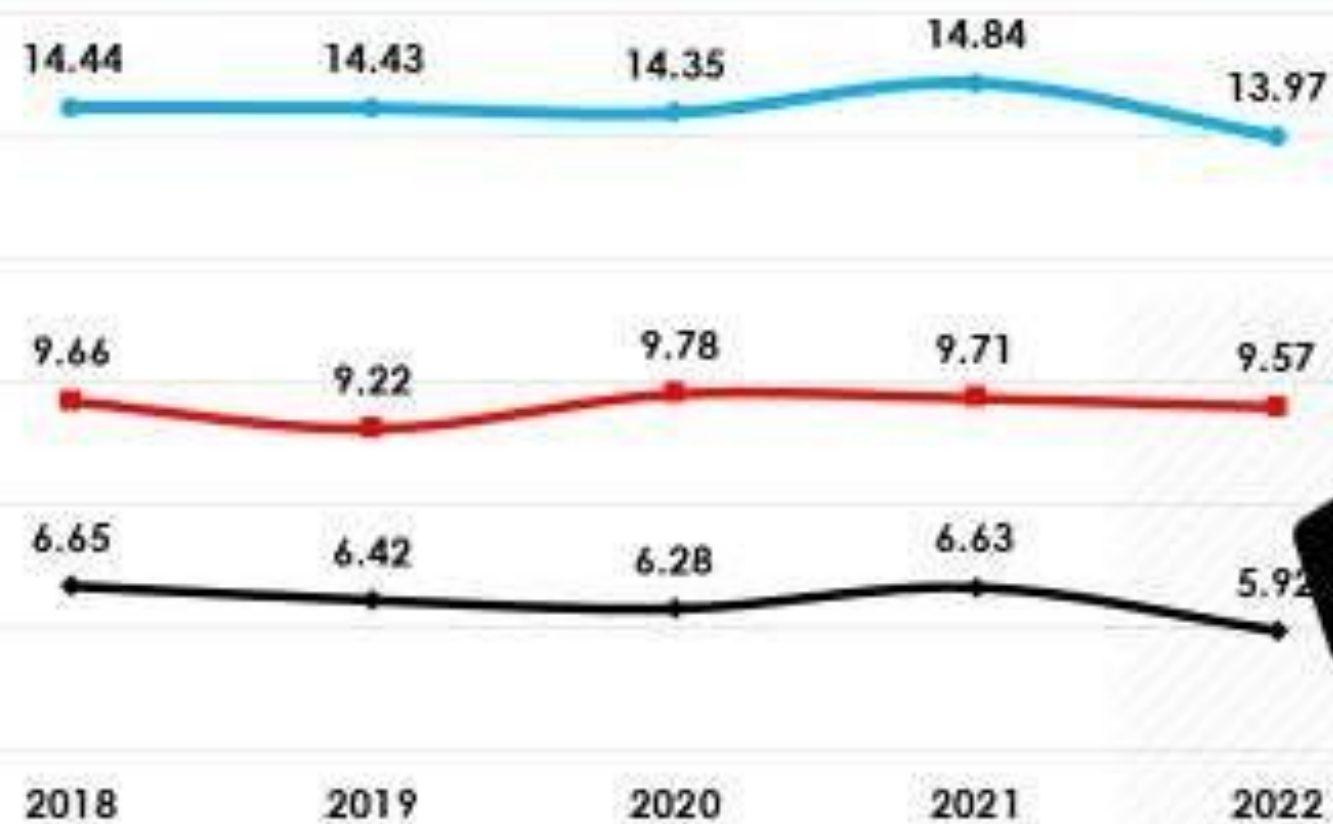
- Luas Wilayah : 620,73 km<sup>2</sup>
- Memiliki 2 Kecamatan
- 13 Desa, dan 77 Dusun
- Jumlah Penduduk : 21.780 jiwa  
Rata2Kepadatan Penduduk : 36,05 orang/km<sup>2</sup>
- Pusat Pemerintahan dan Ekonomi
- Kawasan Pariwisata (Wisata Bahari Mapadegat dan Katiet)
- Kawasan konservasi Selat Bunga Laut

## PAGAI



- Luas Wilayah : 1.535,13 km<sup>2</sup>
- Memiliki 3 Kecamatan
- 10 Desa, dan 74 Dusun
- Jumlah Penduduk : 25.623 jiwa  
Rata2Kepadatan Penduduk : 19,98 orang/km<sup>2</sup>
- Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT)
- Memiliki 3 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yaitu Pulau Nyiau, Pulau Pagai Utara dan Pulau Sibarubaru

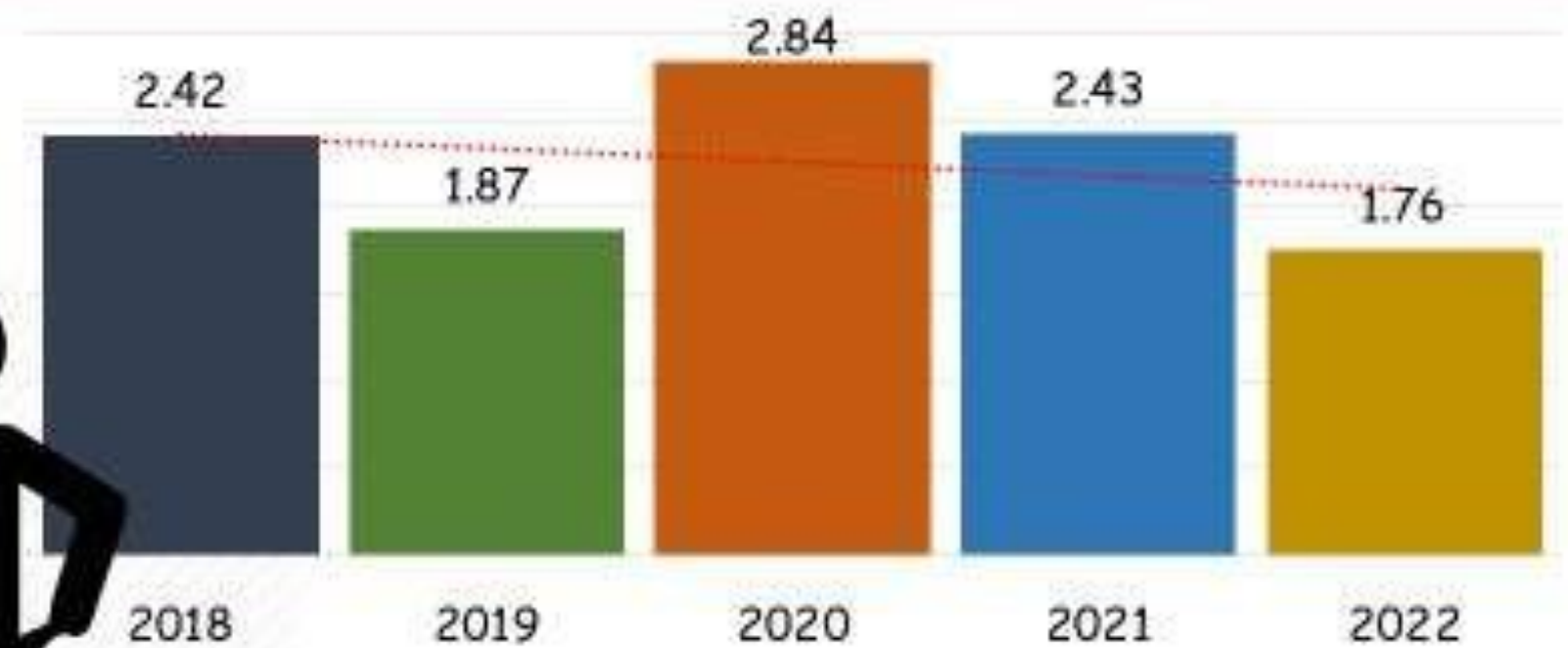
## TINGKAT KEMISKINAN (%) KAB. KEPULAUAN MENTAWAI (2022)



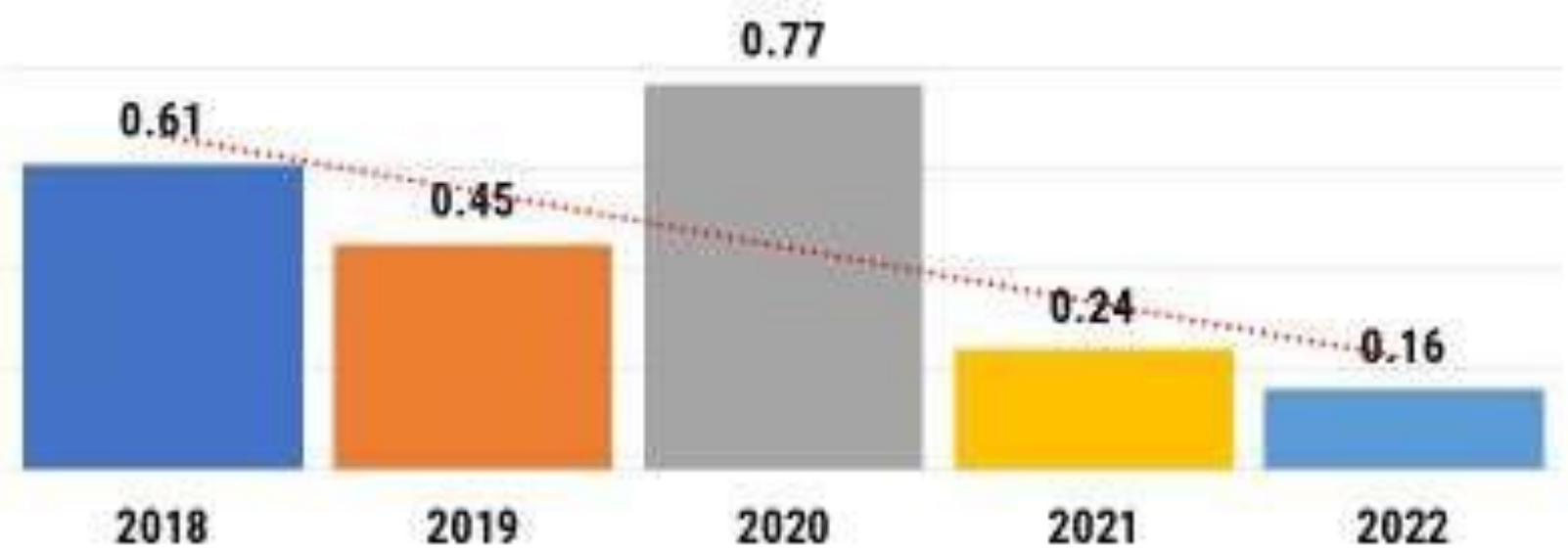
— Kab. Kep. Mentawai — Prop. Sumatera Barat — Indonesia

- Tingkat Kemiskinan Kab. Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan yaitu dari 14,44 persen tahun 2018 turun menjadi 13,97 persen tahun 2022.
- Indeks kedalaman kemiskinan Kab. Kep. Mentawai menunjukkan tren penurunan dari 2,42 (tahun 2018) menjadi 1,76 (tahun 2022). Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin dekat.
- Indeks keparahan kemiskinan Kab. Kep. Mentawai menunjukkan tren penurunan dari 0,61 (tahun 2018) menjadi 0,16 (tahun 2022). Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

## Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kep. Mentawai (2018-2022)



## Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kep. Mentawai (2018-2022)



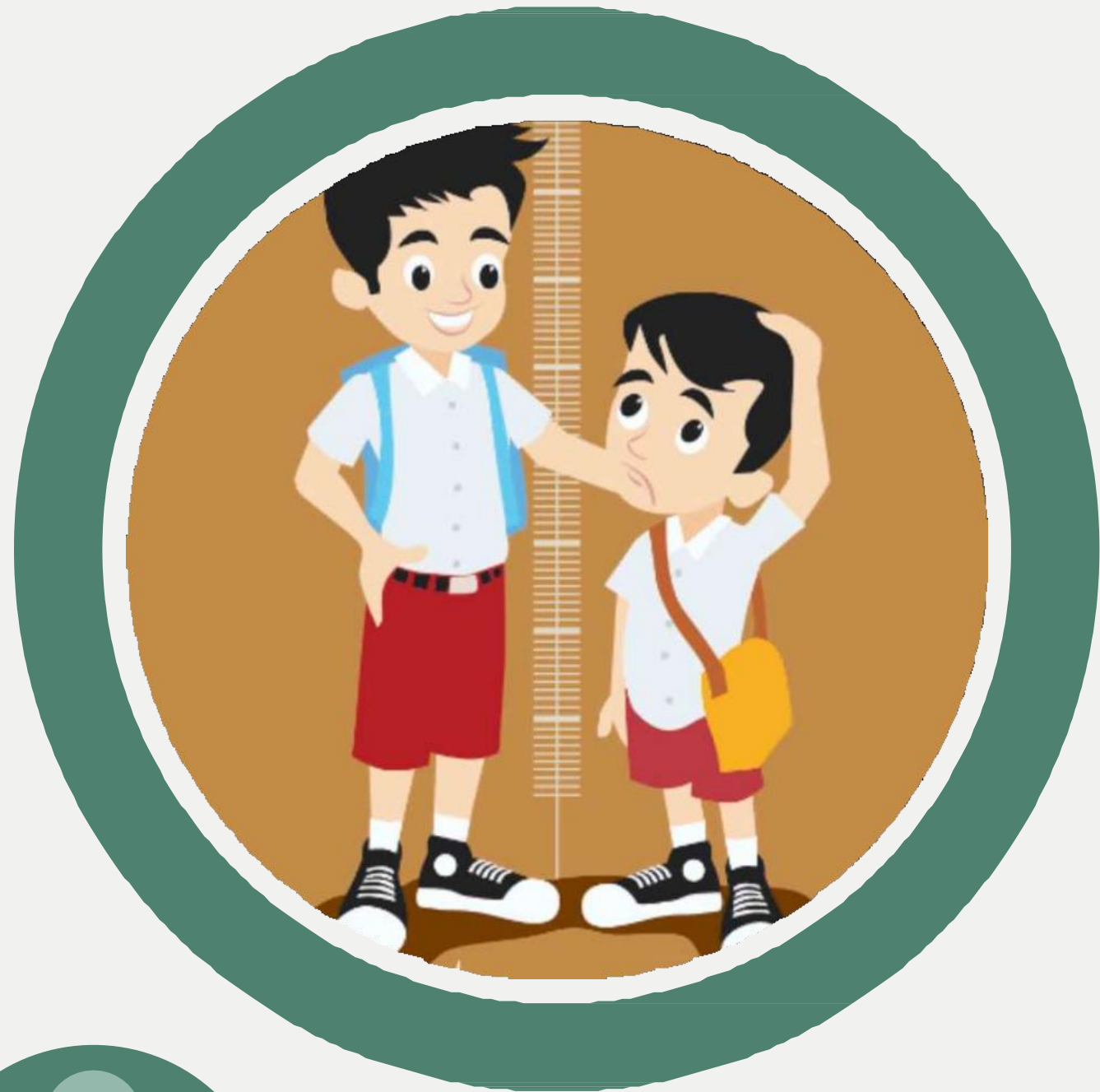
# 5 (LIMA) PILAR PENCEGAHAN STUNTING

- ◆ KOMITMEN DAN VISI KEMPEMIMPINAN NASIONAL DAN DAERAH
- ◆ KAMPANYE NASIONAL DAN PERUBAHAN PERILAKU
- ◆ KONVERGENSI KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PROGRAM PUSAT DAN DAERAH
- ◆ KETAHANAN PANGAN DAN
- ◆ GIZI PEMANTAUAN DAN
- ◆ EVALUASI



# STUNTING :

Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



# Dasar Hukum

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021  
tentang Percepatan Penurunan Stunting**

**Peraturan kepala BKKBN nomor 12 Tahun  
2021 tentang Rencana Aksi Nasional  
Percepatan Penurunan stunting Stunting**

**Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Nomor.050/4890/SJ tanggal 24 Agustus  
tentang Percepatan Penurunan Stunting di  
Daerah .**





# 8 AKSI KONVERGENSI STUNTING

1.

ANALISIS SITUASI  
(PIC : BAPPEDA)

2.

RENCANA KEGIATAN  
(PIC. : BAPPEDA )

3.

REMBUK STUNTING  
( PIC : SETDA/BAPPEDA)

4.

PERBUP/PERWALI : PERAN DESA  
(PIC : DPMD )

5.

PEMBINAAN KPM  
(PIC : DMPD)

6.

MANAJEMEN DATA  
(PIC : BAPPEDA)

7.

PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING  
(PIC : DINAS KESEHATAN)

8.

REVIU KINERJA TAHUNAN  
(PIC : SETDA /BAPPEDA)

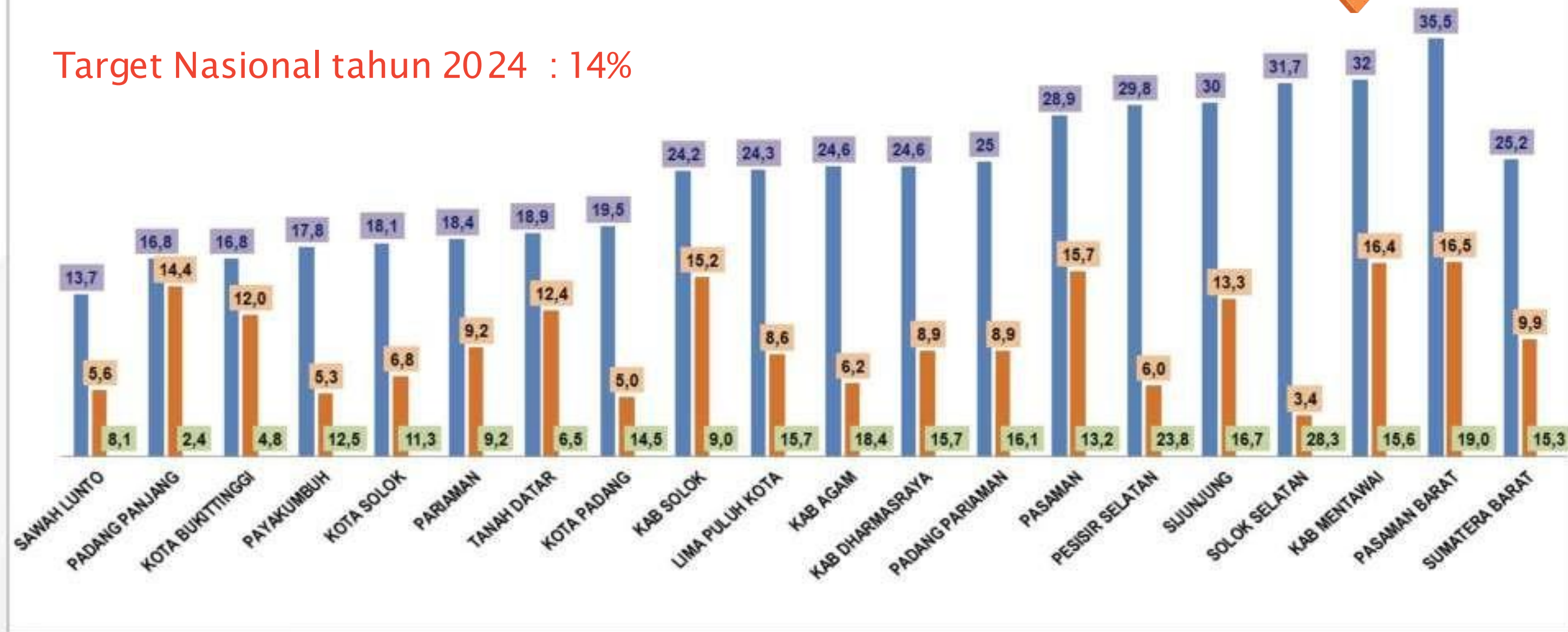
Aksi Integrasi : Adalah Instrumen dalam bentuk Kegiatan Yang Digunakan Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Integrasi Intervensi Gizi Dalam Penurunan Stunting



### PREVALENSI STUNTING BALITA PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN DATA SSGI 2022 DAN E-PPGBM 2022

■ SSGI 2022 ■ e-PPGBM 2022 ■ Gap

Target Nasional tahun 2024 : 14%



# Kabupaten Kepulauan Mentawai baru dijadikan lokus Prioritas Stunting oleh pusat pada tahun 2022



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/02/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PERLUASAN KABUPATEN/KOTA LOKASI  
FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
  - bahwa untuk mempercepat pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi perlu untuk diperluas dari 360 kabupaten/kota menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kabupaten/kota dan perluasan

## PERLUASAN KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2022

1. Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
2. Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
3. Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
4. Kota Langsa, Provinsi Aceh
5. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
6. Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
7. Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh
8. Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
9. Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
10. Kota Sabang, Provinsi Aceh
11. Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
12. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
13. Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara
14. Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara
15. Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
16. Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
17. Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
18. Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara
19. Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
20. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
21. Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
22. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
23. Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
24. Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat

# Pelaksanaan 8 aksi konvergensi pada aplikasi [monev.bangda.kemendagri.go.id](http://monev.bangda.kemendagri.go.id)



Bina Bangda Selasa, 30 May 2023 | 09:22:44 Periode 2023

AKSI 1  
Formulir 1.1 Aksi 1 / Formulir 1.1 m336z318w294h33

Kabupaten

DASHBOARD

Pantau Aksi

Dashboard

MASTER ANSIT

- AKSI 1
- AKSI 2
- AKSI 3
- AKSI 4
- AKSI 5
- AKSI 6
- AKSI 7
- AKSI 8
- LAPORAN
- USER MANUAL

DATA STUNTING TAHUN BERJALAN KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN MENTAWAI - DIVERIFIKASI Download Excel

Show 50 entries Search:


KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	STUNTING			01 Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	02 Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	03 Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	04 Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	05 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Pe
			Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi						
PAGAI UTARA	SAUMANGANYAK	Saumanganya	421	72	24,74%	36,51	0,00	N/A	0,00	N/A	
SIKAKAP	SIKAKAP	Sikakap	684	67	21,14%	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	
SIBERUT SELATAN	Sarereiket	Matotonan	148	59	42,75%	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	
SIBERUT BARAT	BETAET	Simalegi	196	59	30,57%	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	
SIPORA UTARA	MAPADDEGAT	Tuapejat	262	52	14,40%	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	



# Rapat Koordinasi Penentuan Desa Lokus Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022



# 10 Desa Lokus Tahun 2022 (Keputusan Bupati No 148 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022

  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 148 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting, diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, terintegrasi dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa untuk tercapainya target percepatan penurunan stunting yang terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, perlu ditetapkan lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 148 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI  
TAHUN 2022

DAFTAR DESA PRIORITAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN STUNTING

NO	KECAMATAN	DESA
1	Siberut Selatan	Matotonan
2	Siberut Selatan	Madobag
3	Siberut Tengah	Saibi Samukop
4	Siberut Tengah	Cimpungan
5	Siberut Utara	Mongan Poula
6	Siberut Utara	Bojakan
7	Siberut Utara	Malancan
8	Sipora Utara	Betumonga
9	Pagai Utara	Silabu
10	Pagai Selatan	Makalo

  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,  
YUDIS SABAGGALET

# AKSI 1

## PENYUSUNAN ANALISA SITUASI tahun 2022

(Desa Lokus Stunting Kepulauan Mentawai Tahun 2022 tahun berjalan dan tahun rencana)

FORM 1.1 Desa Lokus Kepulauan Mentawai Tahun 2022																			
NO	KECAMATAN	PUSKEMAS	ID_DESA_BPS	ID_DESA_DAGRI	DESA	JUMLAH KELURGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALENSI	Remaja_putri_konsumsi_TTD	Remaja_putri_menerima_pemeriksaan_status_anemia	Catin_Konsumsi_TTD	Calon_PUS_mempereoleh pemeriksaan kesehatan	Calon_PUS_menerima_pemantauan_kesehatan_reproduksi	Catin_mendapatkan_bimbingan_perkawinan	PUS_yang_menerima_bantuan_tunai_bersyarat	PUS_yang_menerima_BPNT	PUS_jadi_Penerima_Bantuan_lunasan_(PBI)_Jaminan_Kesehatan	Bumil_KE_yang_mendapatkan_tambahan_gizi	Bumil_yang_menerima_TTD_maksimal_90_ablet
1	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040009	1309042008	Malancan	150	50	44,2478	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
2	SIBERUT SELATAN	Sarereiket	1301030008	1309032005	Matotonan	225	58	42,3358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
3	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021002	1309022003	Nemnemleleu	205	30	40,5405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
4	SIPORA SELATAN	BOSUA	1301021003	1309022002	Beriolou	172	25	39,6825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
5	SIPORA UTARA	BOSUA	1301022001	1309082001	Betumonga	109	27	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040005	1309042005	Mongan Poula	172	24	34,7826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	66
7	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021006	1309022008	Saureinu	142	32	34,4086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
8	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021007	1309022007	Matobe	187	33	34,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	58
9	SIBERUT BARAT	BETAET	1301041002	1309052002	Simalegi	305	58	34,3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
10	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040007	1309042003	Bojakan	0	16	34,0426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
11	PAGAI UTARA	SAUMANGANYAK	1301013002	1309012008	Silabu	207	36	32,7273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
12	SIPORA UTARA	MAPADDEGAT	1301022002	1309082002	Goisooinan	198	23	29,4872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5
13	PAGAI SELATAN	BULASAT	1301011001	1309102002	Bulasat	184	51	28,8136	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040003	1309042007	Sirilogui	160	34	28,5714	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021004	1309022004	Mara	183	18	28,5714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12
16	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	1301011004	1309102003	Malakopa	88	33	25,5814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	SIPORA SELATAN	BOSUA	1301021001	1309022001	Bosua	178	23	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	30
18	SIBERUT BARAT	BETAET	1301041001	1309052001	Simatalu	155	57	24,8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
19	PAGAI UTARA	SAUMANGANYAK	1301013001	1309012009	Saumanganya	566	72	24,7423	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	28

Lokus Tahun Berjalan

Lokus Tahun Rencana



# AKSI 1

## PENYUSUNAN ANALISA SITUASI tahun 2023

(Desa Lokus Stunting Kepulauan Mentawai Tahun 2023 tahun rencana & tahun berjalan)

1 Kepulauan Mentawai Tahun 2023																				
NO	KECAMATAN	PUSKEMAS	ID_DESA_BPS	ID_DESA_DAGR	DESA	JUMLAH KELURGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALENSI	Remaja_p utri_kons umsi_TTD	Remaja_p utri_mene rima_pem eriksaan_ status_an emia	Catin_Kon sumsi_TTD	Calon_PU S_membe roleh pemeriksa an_keseh atan	Calon_PU S_meneri ma_pend ampingan _kesehata n_reprod uksi	Catin_me ndapatka n_bimbin gan_perka winan	PUS_yang _menerima _bantuan_ tunai_b ersyarat	PUS_yang _menerima _bantuan_ BPNT	PUS_menj adi_Pener ima_Bant uan_luran _(PBI)_Ja minan_Ke sehatan	Bumil_ yang_ mendapat kan_tamb ahan_asu pan_gizi	Bumil_ya ng_mengi ngkonsumsi_ TTD_minimal_90_tabelt	
2																				
3	1	SIBERUT SELATAN	Sarereiket	1301030008	1309032005	Matotonan	148	59	42.7536	0	0	NA	0	NA	0	6	3	12	100	94
4	2	PAGAI UTARA	SAUMAN GANYAK	1301013002	1309012008	Silabu	192	36	32.7273	36.51	0	NA	0	NA	0	5	2	10	100	43.85
5	3	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021002	1309022003	Nemnemleleu	172	24	32.4324	0	0	NA	0	NA	0	5	2	16	100	78.43
6	4	SIPORA SELATAN	BOSUA	1301021003	1309022002	Berulou	165	20	31.25	0	0	NA	0	NA	0	5	1	14	100	51.95
7	5	SIBERUT BARAT	BETAET	1301041002	1309052002	Simalegi	196	59	30.5699	0	0	NA	0	0	0	0	2	21	100	100
8	6	SIPORA UTARA	MAPADDE GAT	1301022002	1309082002	Goisooinan	138	23	29.4872	0	0	NA	0	NA	0	6	1	6	100	56.29
9	7	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021007	1309022007	Matobe	144	28	29.1667	0	0	NA	0	NA	0	5	2	9	100	78.43
10	8	SIPORA UTARA	BOSUA	1301022001	1309082001	Betumonga	107	22	28.9474	15.09	0	NA	0	0	0	6	2	7	100	51.95

**Dasar untuk penentuan desa lokus stunting tahun 2023 dan tahun rencana**

# lanjutan.....

10		UIARA																		
11	9	PAGAI SELATAN	BULASAT	1301011001	1309102002	Bulasat	184	51	28.8136	0	0	NA	0	NA	0	11	3	20	100	83.75
12	10	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021004	1309022004	Mara	170	17	26.9841	0	0	NA	0	NA	0	5	1	12	100	78.43
13	11	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	1301011004	1309102003	Malakopa	86	33	25.5814	0	0	NA	0	NA	0	11	2	17	100	58.04
14	12	PAGAI UTARA	SAUMAN GANYAK	1301013001	1309012009	Saumanganya	421	72	24.7423	36.51	0	NA	0	NA	0	5	4	11	100	43.89
15	13	SIPORA SELATAN	BOSUA	1301021001	1309022001	Bosua	131	22	23.913	15.09	0	NA	0	NA	0	5	3	6	100	51.59
16	14	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021006	1309022008	Saureinu	142	22	23.6559	0	0	NA	0	NA	0	5	2	20	100	78.43
17	15	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	1301011003	1309102004	Makalo	195	24	22.4299	0	0	NA	0	NA	0	11	4	7	100	58.04
18	16	SIKAKAP	SIKAKAP	1301012003	1309092003	Matobe	276	22	21.5686	0	0	NA	0	NA	0	12	5	5	100	65.1
19	17	PAGAI UTARA	SAUMAN GANYAK	1301013003	1309012007	Betumonga	87	30	21.4286	36.51	0	NA	0	0	0	5	1	14	100	43.89
20	18	PAGAI SELATAN	BULASAT	1301011002	1309102001	Sinaka	148	45	21.4286	0	0	NA	0	NA	0	11	3	4	100	83.75
21	19	SIKAKAP	SIKAKAP	1301012002	1309092001	Sikakap	684	67	21.1356	0	0	NA	0	0	100	12	4	6	100	65.1
22	20	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040009	1309042008	Malancan	123	23	20.5357	22.97	0	NA	0	NA	0	3	2	15	100	93.49
23	21	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021005	1309022006	Sioban	101	34	19.883	0	0	NA	0	0	0	5	3	13	100	78.43
		SIBERUT	SIGAPOKN																	



# Lanjutan.....

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
22	20	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040009	1309042008	Malancan	123	23	20.5357	22.97	0	NA	0	NA	0	3	2	15	100	93.45
23	21	SIPORA SELATAN	SIOBAN	1301021005	1309022006	Sioban	101	34	19.883	0	0	NA	0	0	0	5	3	13	100	78.43
24	22	SIBERUT BARAT	SIGAPOKNA	1301041003	1309052003	Sigapokna	273	38	19.1919	11.98	0	NA	0	NA	0	0	3	11	100	100
25	23	SIPORA UTARA	MAPADDEGAT	1301022005	1309082004	Sido Makmur	83	17	18.8889	0	0	NA	0	NA	0	6	1	6	100	65.29
26	24	SIBERUT BARAT	BETAET	1301041001	1309052001	Simatalu	155	50	17.7305	0	0	NA	0	NA	0	0	2	12	100	100
27	25	SIKAKAP	SIKAKAP	1301012001	1309092002	Taikako	289	27	14.6739	0	0	NA	0	NA	0	12	5	3	100	65.29
28	26	SIPORA UTARA	MAPADDEGAT	1301022006	1309082003	Tuapejat	262	52	14.4044	0	0	NA	0	0	0	6	4	10	100	65.29
29	27	SIBERUT SELATAN	Sarereiket	1301030002	1309032007	Madobag	351	18	13.6364	0	0	NA	0	NA	0	6	4	9	100	94
30	28	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040005	1309042005	Mongan Poula	166	9	13.0435	22.97	0	NA	0	NA	0	3	1	16	100	93.45
31	29	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	1301030006	1309032004	Muntei	239	16	13.0081	0	0	NA	0	NA	0	6	2	8	100	80.65
32	30	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040003	1309042007	Sirilogui	142	15	12.931	22.97	0	NA	0	NA	0	3	2	12	100	93.45
33	31	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040007	1309042003	Bojakan	0	14	12.1739	22.97	0	NA	0	NA	0	3	1	5	100	93.45
			MUARA																	

# lanjutan.....

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
34	32	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040006	1309042004	Sotboyak	86	5	11.9048	22.97	0	NA	0	NA	0	3	1	16	100	93.45
35	33	SIPORA UTARA	MAPADDEGAT	1301022003	1309082005	Bukit Pamewa	91	5	7.5758	0	0	NA	0	0	0	6	1	18	100	65.29
36	34	SIPORA UTARA	MAPADDEGAT	1301022004	1309082006	Sipora Jaya	166	10	6.3694	0	0	NA	0	NA	0	6	1	7	100	65.29
37	35	SIBERUT TENGAH	SAIBI SAMUKOP	1301032001	1309072003	Saliguma	13	11	5.3398	25.65	0	NA	0	NA	0	12	5	12	100	86.36
38	36	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	1301040004	1309042006	Muara Sikabalan	396	9	4.8649	22.97	0	NA	0	NA	0	3	1	47	100	93.45
39	37	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	1301030005	1309032003	Maileppet	246	7	4.7619	0	0	NA	0	NA	0	6	2	15	100	80.65
40	38	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	1301030004	1309032002	Muara Siberut	248	9	4.3269	0	0	NA	0	NA	0	6	1	18	100	80.65
41	39	SIBERUT TENGAH	SAIBI SAMUKOP	1301032003	1309072002	Cimpungan	27	4	4.1667	25.65	0	NA	0	NA	0	12	1	17	100	86.36
42	40	SEBERUT BARAT DAYA	PEIPEI PASAKIAT TAILELEU	1301031001	1309062003	Pasakiat Teileleu	378	7	3.271	0	0	NA	0	0	0	8	3	13	100	55.69
43	41	SEBERUT BARAT DAYA	PEIPEI PASAKIAT TAILELEU	1301031003	1309062002	Sagulubbeg	154	5	2.9762	0	0	NA	0	0	0	8	2	11	100	55.69
44	42	SIBERUT TENGAH	SAIBI SAMUKOP	1301032002	1309072001	Saibi Samukop	198	8	2.7119	25.65	0	NA	0	NA	0	12	5	4	100	86.36
43	43	SEBERUT	PEIPEI PASAKIAT	1301031002	1309062001	Katurei	60	2	1.0695	0	0	NA	0	NA	0	8	3	21	100	55.69

Lokus Tahun Berjalan

Lokus Tahun Rencana

# Kebijakan Penanganan Stunting yang sudah disusun :



**Perbup Kab. Kep. Mentawai No. 7 Tahun 2020 Ttg Gerakan Mentawai Anti Stunting & Gizi Buruk**



**Keputusan Bupati No.193 Thn 2022 Ttg Tim Audit Kasus Stunting Kab.Kep. Mentawai 2022**



**Keputusan Bupati No.280 Thn 2022 Ttg Kampung Keluarga Berkualitas di Mentawai**



**Keputusan Bupati No.376 Thn 2021 Ttg Pembentukan TPK Pencegahan dan Penurunan Stunting di Mentawai**



Lanjutan :.....



**Perda Kab. Kepulauan Mentawai No.7 Tahun 2019  
Tentang Kawasan Tanpa Rokok**



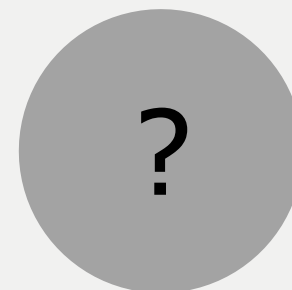
Surat Edaran Bupati No.410/464/Setda Pembentukan  
POKJA Kampung Keluarga Berkualitas



Perbup Kab.Kep. Mentawai No. 4 thn 2019 Ttg juknis  
Penggunaan Dana JAMPERSAL di Mentawai



Perbup Kab.Kep. Mentawai No.3 tahun 2018 Ttg Pedoman  
Penggunaan Dana Kapitasi JKN Pada Faskes TK.I



Perbup Kab.Kep. Mentawai tentang percepatan  
penurunan stunting (Proses persetujuan Menteri)



# PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PASCA DIKELUARKANNYA PERPRES 72 TAHUN 2021



**SK Bupati No. 258 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022**



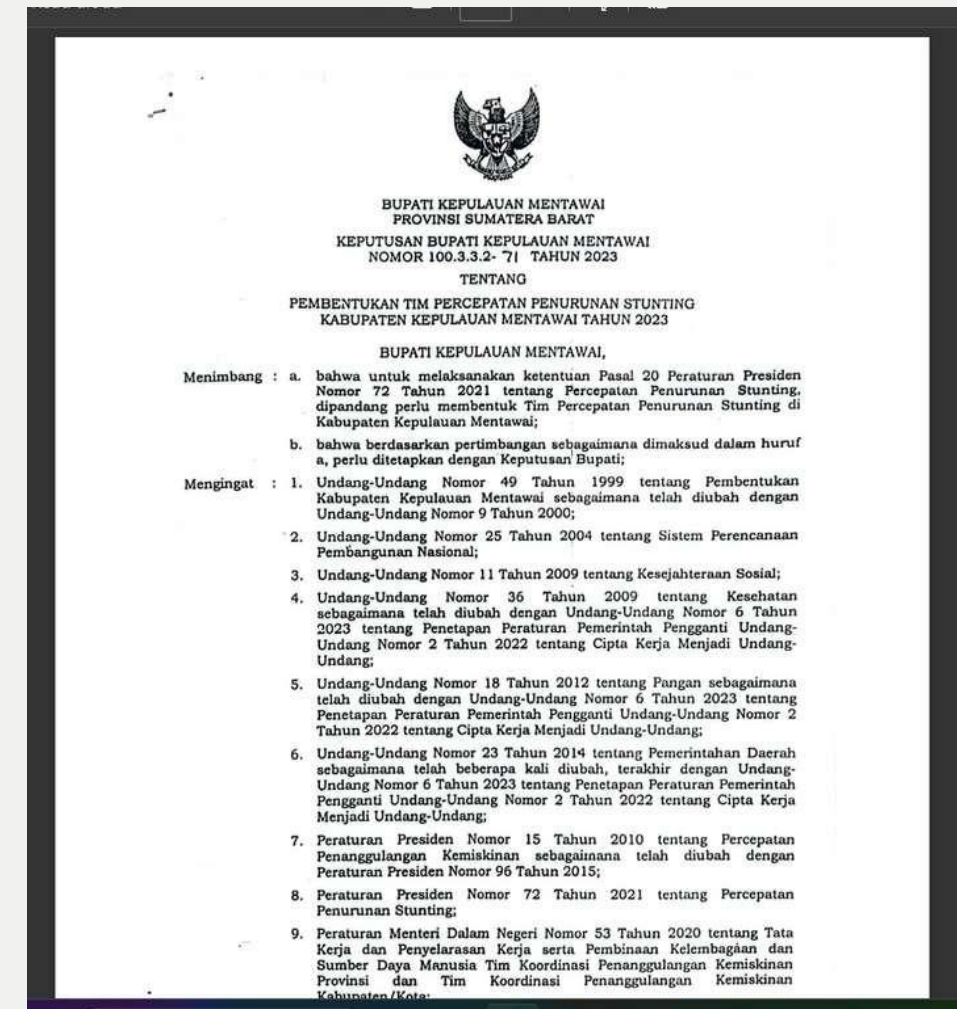
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 258 TAHUN 2022

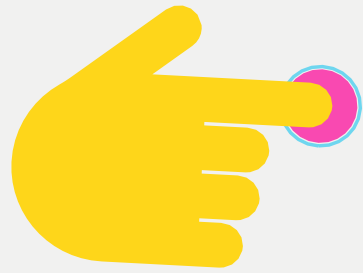
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

**SK Bupati No. 100.3.3.2-71-23 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023**



Di Kabupaten Kepulauan Mentawai  
sudah dibentuk TPPS di 43 Desa pada 10  
Kecamatan



## Hasil identifikasi kendala Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Aspek Analisis Manajemen Layanan	Kendala yang Diidentifikasi
1	Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	1 Belum tersosialisasinya regulasi tentang stunting di Kabupaten.
		2 Rencana Kerja (Renja) OPD belum seluruhnya mengintegrasikan indikator kinerja terkait stunting
		3 Belum optimalnya penganggaran untuk kegiatan - kegiatan terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting, terutama di OPD
		4 Belum tersedianya sistem pengawasan di daerah untuk pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting, baik di tingkat kabupaten maupun nagari
2	Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program	1 Program yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai yang semestinya
3	Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana	1 Tidak ada staf khusus yang mengelola data terkait stunting di OPD pelaksana program
		2 Masih adanya perbedaan pemahaman pelaksana dan kader dalam menerjemahkan indikator ke dalam program (ambiguitas indikator)
4	Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	1 Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk untuk menyediakan sendiri sarana sanitasi dan air bersih
		2 Anggaran terkait stunting di OPD lebih banyak mengandalkan DAK dan dana APBN, sehingga banyak daerah / nagari prioritas yang tidak bisa mengakses program OPD

## Rekomendasi Hasil Analisis Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Perihal	Isi Rekomendasi
1	Perbaiki manajemen alokasi anggaran / perbaiki target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran dilakukan secara terintegrasi lintas sektor</li> <li>2. Program/kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi kedalam dokumen perencanaan daerah</li> <li>3. Pelaksanaan aksi konvergensi stunting dilakukan bersama dengan siklus perencanaan daerah</li> </ol>
2	Perbaiki manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan layanan intervensi spesifik dan sensitif diterima oleh target sasaran</li> <li>2. Memastikan program/kegiatan intervensi sesuai dengan kebutuhan dan menjawab masalah yang dihadapi oleh target sasaran</li> <li>3. Meningkatkan standard pelayanan dan memperbaiki mekanisme pelayanan yang diarahkan kepada target sasaran</li> </ol>
3	Perbaiki koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan forum perangkat daerah dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam menyusun kebutuhan program/kegiatan dan anggaran</li> <li>2. Mengefektifkan mekanisme koordinasi lintas OPD termasuk dengan perangkat kecamatan dan nagari untuk percepatan penurunan stunting</li> </ol>
4	Perbaiki manajemen data stunting dan cakupan intervensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan tersedianya data prevalensi stunting dan data cakupan layanan yang berkualitas hingga tingkat desa</li> <li>2. Memastikan sistem pencatatan dan pelaporan data dilakukan secara berkala dan updated</li> <li>3. Adanya program/kegiatan untuk melakukan perbaikan data yang dibutuhkan untuk mendukung aksi</li> </ol>

**RAPAT KOORDINASI STUNTING DAN LINTAS SEKTOR,  
MELAKUKAN INTERVENSI PENANGANAN STUNTING MELALUI  
PROGRAM KEGIATAN DI PERANGKAT DAERAH TERKAIT**







## PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN STUNTING TA 2022 (APBD 2022 DAN RAPBD 2023)



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah (Rp)		
		APBD 2022	RAPBD 2023	Selisih
1.	<b>BELANJA PADA SKPD</b>			
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>295.688.500,00</b>	<b>130.059.800,00</b>	<b>(165.628.700,00)</b>
a.	Program Pengelolaan Pendidikan/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Sub Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	185.000.000,00		(185.000.000,00)
b.	Program Pengelolaan Pendidikan/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	110.688.500,00	130.059.800,00	19.371.300,00
	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>57.158.415.372,00</b>	<b>52.930.864.529,00</b>	<b>(4.227.550.843,00)</b>
	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan</b>	<b>34.201.110.194,00</b>	<b>32.376.202.417,00</b>	<b>(1.824.907.777,00)</b>
a.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	75.000.000,00	815.039.000,00	740.039.000,00
b.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	929.733.000,00	1.129.699.800,00	199.966.800,00
c.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.000.000,00	1.166.040.000,00	1.116.040.000,00
d.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	50.000.000,00	711.040.000,00	661.040.000,00

# Lanjutan...

c.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.000.000,00	1.166.040.000,00	1.116.040.000,00
d.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	50.000.000,00	711.040.000,00	661.040.000,00
e.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	50.000.000,00	470.525.460,00	420.525.460,00
f.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	80.610.000,00	149.887.900,00	69.277.900,00
g.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	907.505.852,00	1.016.220.307,00	108.714.455,00
h.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	273.878.000,00	150.000.000,00	(123.878.000,00)
i.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	75.000.000,00	50.112.000,00	(24.888.000,00)
j.	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00
k.	Sub Kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	3.843.433.500,00	2.689.339.524,00	(1.154.093.976,00)
l.	Sub Kegiatan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	-
m.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	955.376.946,00	1.640.739.650,00	685.362.704,00

# Lanjutan...

n.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	26.343.972.896,00	21.710.405.276,00	(4.633.567.620,00)
o.	Sub Kegiatan Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	466.600.000,00	427.153.500,00	(39.446.500,00)
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>22.907.305.178,00</b>	<b>20.479.662.112,00</b>	<b>(2.427.643.066,00)</b>
a.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	7.303.951.567,00	785.196.000,00	(6.518.755.567,00)
b.	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	636.447.000,00	5.148.622.100,00	4.512.175.100,00
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.157.397.050,00	
c.	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2.070.679.840,00		(2.070.679.840,00)
d.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.157.397.050,00	2.157.397.050,00
e.	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	6.868.272.320,00	6.593.976.000,00	(274.296.320,00)
f.	Pengadaan obat, vaksin	3.743.527.836,00	2.011.255.885,00	(1.732.271.951,00)
g.	Pengadaan bahan habis pakai	2.284.426.615,00	1.625.818.027,00	(658.608.588,00)

# Lanjutan...

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan/Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota		50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
a.	Sub Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>9.366.446.700,00</b>	<b>16.384.562.658,00</b>	<b>7.018.115.958,00</b>
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota		9.366.446.700,00	16.384.562.658,00	7.018.115.958,00
a	Sub Kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	1.052.530.000,00	1.193.975.700,00	141.445.700,00
b	Sub Kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	600.000.000,00	723.363.850,00	123.363.850,00
c.	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan		2.989.620.400,00	
e.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.040.954.300,00	8.525.394.000	(3.051.333.900,00)
f.	Sub Kegiatan operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	1.672.962.400,00	2.163.319.708,00	490.357.308,00
g.	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	-	788.889.000,00	788.889.000,00

# Lanjutan...

	Kawasan perkotaan			
g.	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	-	788.889.000,00	788.889.000,00
<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>		<b>7.844.794.633,00</b>	<b>19.391.698.600,00</b>	<b>11.546.903.967,00</b>
Program Kawasan Permukiman/Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha				
a.	Sub Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni	191.898.000,00	9.455.824.100,00	9.263.926.100,00
b.	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	516.940.000,00	295.640.000,00	(221.300.000,00)
c.	Pembangunan rumah baru layak huni	6.185.956.633,00		(6.185.956.633,00)
d.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		184.410.400,00	184.410.400,00
Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh/Kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota				
a.	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	950.000.000,00	9.455.824.100,00	8.505.824.100,00
<b>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		<b>643.983.500,00</b>	<b>603.538.600,00</b>	<b>(40.444.900,00)</b>

# Lanjutan...

	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	643.983.500,00	603.538.600,00	(40.444.900,00)
	Program Pemberdayaan Sosial/Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	231.115.500,00		(231.115.500,00)
a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	79.303.000,00	58.853.800,00	(20.449.200,00)
b.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.704.500,00		(75.704.500,00)
c.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	76.108.000,00		(76.108.000,00)
	Program Pemberdayaan Sosial/Kegiatan	43.139.000,00		(43.139.000,00)
a.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	43.139.000,00		(43.139.000,00)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	369.729.000,00		(369.729.000,00)
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		431.029.400,00	431.029.400,00

# Lanjutan...

b.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	369.729.000,00	113.655.400,00	(256.073.600,00)
c.	Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	-		-
<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>		<b>802.559.000,00</b>		<b>(802.559.000,00)</b>
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat/Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		802.559.000,00		(802.559.000,00)
a.	Sub Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	802.559.000,00		(802.559.000,00)
<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>		<b>1.327.681.050,00</b>	<b>388.423.800,00</b>	<b>(939.257.250,00)</b>
Program Pengelolaan Persampahan/Kegiatan Pengelolaan Sampah		1.327.681.050,00	388.423.800,00	(939.257.250,00)
a.	Sub Kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	194.212.250,00	144.711.500,00	(49.500.750,00)
b.	Sub Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	92.179.800,00		(92.179.800,00)
	Sub Kegiatan penediaan sarana dan prasarana			

# Lanjutan...

Rekening Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
b.	Sub Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	92.179.800,00		(92.179.800,00)
c.	Sub Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.041.289.000,00	243.712.300,00	(797.576.700,00)
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		<b>2.718.747.567,00</b>	<b>2.684.200.400,00</b>	<b>(34.547.167,00)</b>
a.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	146.982.400,00	526.345.000,00	379.362.600,00
b.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1.762.400,00		(1.762.400,00)
c.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.800,00	95.635.000,00	(51.644.800,00)
d.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	471.187.500,00	480.302.000,00	9.114.500,00
e.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	206.352.500,00	92.619.000,00	(113.733.500,00)
f.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4.500.000,00	12.600.000,00	8.100.000,00
g.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	164.556.033,00	228.854.000,00	64.297.967,00





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN STUNTING**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	2	3
	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28,590,365,656.00</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75,000,000.00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,129,733,000.00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50,000,000.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50,000,000.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50,000,000.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50,000,000.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	80,610,000.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	907,505,900.00

# Lanjutan..

1.	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	273,878,000.00	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50,000,000.00	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75,000,000.00	
	12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3,843,433,500.00	
	13	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50,000,000.00	
	14	Operasional Pelayanan Puskesmas	21,905,205,256.00	
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>12,737,717,996.00</b>
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	105,238,000.00	
	2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,020,679,840.00	
	3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6,868,272,320.00	
4	Pengadaan Obat, Vaksin	3,743,527,836.00		

# Lanjutan..

		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50,000,000.00</b>
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50,000,000.00
		<b>PUPR</b>	
		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9,326,483,300.00</b>
<b>2</b>	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	800,000,000.00
	2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6,055,254,300.00
	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	784,125,000.00
	4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1,687,104,000.00
		<b>DINAS KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN</b>	
		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>6,975,782,633.00</b>
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6,296,996,633.00
	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	678,786,000.00

# Lanjutan..

<b>3</b>		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>950,000,000.00</b>
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	950,000,000.00
		<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>274,254,500.00</b>
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	79,303,000.00
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75,704,500.00
<b>4</b>	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	76,108,000.00

# Lanjutan..

	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	43,139,000.00
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>798,315,000.00</b>
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	428,586,000.00
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	369,729,000.00
		<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>	
		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>802,559,000.00</b>
5	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	802,559,000.00
		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>	
		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>1,327,681,050.00</b>
	1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	194,212,250.00

# Lanjutan..

6	1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	194,212,250.00
	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	92,179,800.00
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,041,289,000.00
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>146,982,400.00</b>
	1	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	146,982,400.00

# Lanjutan..

7		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>471,187,500.00</b>
	1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	471,187,500.00
		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>206,352,500.00</b>
	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	206,352,500.00
		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>259,302,967.00</b>
	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4,500,000.00
	2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	164,556,033.00
	3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	84,271,934.00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan		

## Lanjutan..

	4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5,975,000.00
		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>426,230,000.00</b>
	1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	426,230,000.00
		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1,059,650,000.00</b>
	1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	600,000,000.00
	2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	459,650,000.00
		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	<b>8</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>110,688,500.00</b>
	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	110,688,500.00
		<b>Total Alokasi Anggaran Stunting</b>	<b>64,662,595,202.00</b>





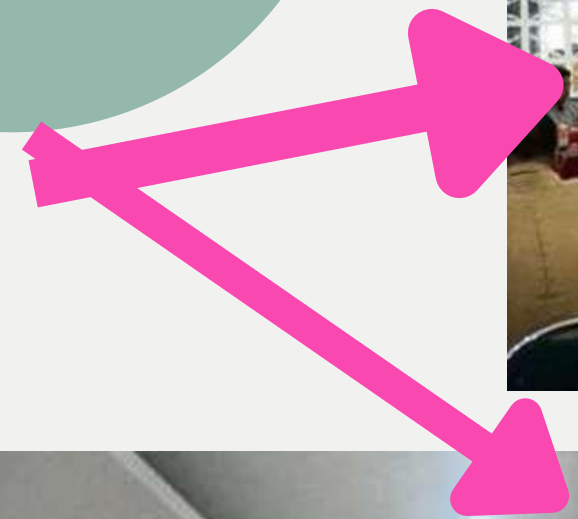
# AKSI3 REMBUK STUNTING

PUBLIKASI REMBUK  
STUNTING DI MEDIA  
ELEKTRONIK(YOUTUBE  
KOMINFO MENTAWAI)



REMBUK STUNTING TINGKAT DESA - KECAMATAN

REMBUK  
STUNTING  
TINGKAT  
KABUPATEN





**AKSI 4  
PERATURAN  
BUPATI  
TENTANG  
PERCEPATAN  
PENURUNAN  
STUNTING  
(tahun 2022)**

Sosialisasi Ranperbup Stunting secara Virtual Bersama OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa

**DOKUMENTASI ACARA SOSIALISASI RANPERBUD STUNTING KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



# AKSI 5

## PEMBINAAN KPM (tahun 2022)



Identifikasi Unsur Pelaku Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan

Pembentukan Kader 43 Desa sudah ada



Form 5.1 - Identifikasi Unsur Pelaku Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan - Kabupaten Kepulauan Mentawai - DIVERIFIKASI

ACTION	ID	NOMOR	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	UNSUR KPM			UNSUR TPK			UNSUR TPPS				
					JUMLAH KPM AKTIF	SK	OPERASIONAL	MEMILIKI RENCANA KERJA	JUMLAH TPK	SK	OPERASIONAL	MEMILIKI RENCANA KERJA	JUMLAH TPPS	SK	OPERASIONAL
Verified	25689	1	PAGAI SELATAN	Bulasat	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25690	2	PAGAI SELATAN	Sinaka	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25691	3	PAGAI SELATAN	Makalo	1	Ada	Ada	Ada	2	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25692	4	PAGAI SELATAN	Malakopa	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25693	5	SIKAKAP	Taikako	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25694	6	SIKAKAP	Sikakap	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25695	7	SIKAKAP	Matobe	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25696	8	PAGAI UTARA	Saumanganya	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25697	9	PAGAI UTARA	Silabu	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25698	10	PAGAI UTARA	Betumonge	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25699	11	SIPORA SELATAN	Bosua	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Tidak Ada	1	Ada	Ada
Verified	25700	12	SIPORA SELATAN	Nemnemleleu	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada
Verified	25701	13	SIPORA SELATAN	Berilou	1	Ada	Ada	Ada	2	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada
Verified	25702	14	SIPORA SELATAN	Mara	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada
Verified	25703	15	SIPORA SELATAN	Sioban	1	Ada	Ada	Ada	2	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada
Verified	25704	16	SIPORA SELATAN	Saureinu	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada	Ada	1	Ada	Ada



# AKSI6 SISTEM MANAJEMEN DATA (untuk tahun 2022)



Contoh Kegiatan Manajemen Data Dinas Kesehatan

FORM 6.1A - PEMETAAN KONDISI DATA CAKUPAN INTERVENSI (ESENSIAL) - KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN MENTAWAI - DIVERIFIKASI

Download Data

DATA CAKUPAN INTERVENSI

Data Kesehatan 1

show 10 entries

NO	DATA	PENANGGUNG JAWAB	STATUS KETERSEDIAAN	RINCIAN DATA	SUMBER DATA	METODE PENCATATAN DATA	KETERANGAN METODA PENCATATAN	FREKUENSI PENCATATAN DATA	FREKUENSI PELAPORAN KE OPD	METODA PENGOLAHAN DATA	ALTERNATIF SUMBER DATA		IDENTIFIKASI AWAL ISU MANAJEMEN DATA		
											Sumber Data	Penanggungjawab Data	Ketersediaan	Kualitas	Aksesibilitas
1	Prevalensi Stunting	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Aplikasi	Aplikasi	Bulanan	Tahunan	Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
2	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Pengisian Form	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
3	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Laporan	Penulisan Laporan	Bulanan	Tahunan	Penulisan Laporan (Excel)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Buruk	Tidak Bisa
4	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
5	Persentase calon/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
6	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
7	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan pra nikah	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
8	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
9	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan Aplikasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa
10	Persentase calon/caPUS yang mendapatkan tatalaksana	DINAS KESEHATAN	Ada	Kabupaten/Kota	DINAS	Form	Pengisian Form	Bulanan	Tahunan	Manual dan	Dinas	Dinas Kesehatan	Ada	Sedang	Bisa

**B. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA:**

1. PENGINTUPAN DATA KE APLIKASI EPPGBM
2. ANALISA DATA
3. ANALISA DETERMINAN MASALAH GIZI (STUNTING)
4. ANALISA PENYEBAB MASALAH



# Pelaksanaan Audit Kasus Stunting ( untuk tahun 2022)



## Keputusan Bupati No.193 Thn 2022 Ttg Tim Audit Kasus Stunting Kab.Kepulauan Mentawai 2022



"Audit stunting Tahun 2022 baduta 4 Orang (2 mapaddegat, 2 sidomakmur), Bumil 4 Orang (2 mapaddegat, 2 gosoinan)"

# AKSI 8

## Review Kinerja untuk tahun 2022



FORM 8.1 - MATRIK RENCANA DAN REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Form 8.1

Matrik Rencana Dan Realisasi Program/ Kegiatan Tahun Berjalan - Kabupaten Kepulauan Mentawai

- DIVERIFIKASI

Show 50 entries

Search:

ID Record	ID Form 2.1	Kategori Indikator	No Indikator	Indikator Cakupan Layanan	Uraian Kegiatan	Kode Kepmendagri 050-5889	OPD	Capaian Outcome/Output						Anggaran (juta rupiah)						Status Realisasi	Keterangan	Solusi
								Target	Realisasi	% Capaian	Kategori			Alokasi	Realisasi	% Capaian	Kategori					
											green	yellow	red				green	yellow	red			
44893	66834	esensial	1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 15	DINAS KESEHATAN	1	1	100.00	1	0	0	273,878,000	244,439,000	89.25	0	1	0	permasalahan	Kurangnya kesadaran Individu terhadap pentingnya mengonsumsi tablet tambah darah	kerjasama dengan kepala sekolah
44894	66864	esensial	2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Jumlah remaja putri yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan status anemia	1 02 02 2.02 15	DINAS KESEHATAN	1,402	114	8.13	0	0	1	140,200,000	37,100,000	26.46	0	0	1	permasalahan	masih rendahnya/blm. Belum berhasilnya kegiatan pemeriksaan HB pada rematri dikarenakan belum tersedianya alat dan reagen HB di fasilitas kesehatan (Terkait Anggaran, pada tahun 2022 /salah memasukan anggaran ), terdata baru 8 Puskesmas	Pembuatan MOU sesuai SK Bersama 4 mentri
44895	67424	esensial	3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 15	DINAS KESEHATAN	673	54	8.02	0	0	1	67,300,000	20,200,000	30.01	0	0	1	permasalahan	Belum semua Calon pengantin/calon ibu dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan tablet tambah darah	Optimalkan pelaksanaan MOU antara Kemenag dengan Dinas Kesehatan
44896	66930	esensial	4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 02 02 2.02 06	DINAS KESEHATAN	100	20	20.00	0	0	1	50,000,000	4,100,000	8.20	0	0	1	permasalahan	Belum Optimalnya kerjasama antara Pihak KUA atau Pimpinan Gereja dalam pemberian pemeriksaan kesehatan bagi PUS yang mau menikah ( baru 10 Puskesmas yang melaporkan realisasinya)	Optimalkan kerjasama antara Pihak KUA atau Pimpinan Gereja dalam pemberian pemeriksaan kesehatan bagi PUS yang mau menikah





# KONDISI PENGINPUTAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2023

No	KABUPATEN/KOTA	MASTER ANSIT														AKSI 1			AKSI 2				AKSI 3			AKSI 4			Capaian Ansit - Aksi 4	
		Sasaran	Cakupan	Sosial	TPPS	Kesehatan 1	Kesehatan 2	PMD 1	PMD 2	Kom info	Pendidikan	Agama	KB 1	KB 2	Pangan	Pemetaan	Form 1.1	Form 1.2	Form 1.3	Form 2.1	Form 2.2	Form 2.3	Form 2.4	Form 3.1	Form 3.2	Form 3.3	Form 4.1	Form 4.2		Form 4.3
<b>PROV. SUMATERA BARAT</b>		<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>68%</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>	<b>47%</b>	<b>42%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>26%</b>	<b>32%</b>	<b>37%</b>	<b>21%</b>	<b>11%</b>	<b>21%</b>	<b>71%</b>	
1	Sijunjung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	Kota Payakumbuh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	93%
3	Padang Pariaman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	89%	
4	Kota Bukittinggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	89%	
5	Kota Sawah Lunto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	82%	
6	Kota Solok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	79%	
7	Kepulauan Mentawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	75%	
8	Agam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	75%	
9	Pasaman Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	75%	
10	Dharmasraya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	71%	
11	Kota Padang Panjang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	71%	
12	Solok Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	68%	
13	Solok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	64%	
14	Kota Pariaman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	64%	
15	Lima Puluh Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	54%	
16	Pasaman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	54%	
17	Pesisir Selatan	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	50%	
18	Kota Padang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	50%	
19	Tanah Datar	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	43%	

Terus berproses posisi daerah sampai aksi 8

# Penilaian kinerja aksi konvergensi stunting untuk tahun 2022 , tanggal 25 s/d 29 Mei 2023 di Bappeda Provinsi Sumatera - Barat



# **HAMBATAN PADA PELAKSANAAN KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENC. PENURUNAN STUNTING**

- ◆ **PEMBENTUKAN TPPS KABUPATEN, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN BELUM DIIMBANGI ADANYA PEMAHAMAN YANG MEMADAI TERKAIT TUPOKSI DAN RENCANA KERJA TPPS;**
  - ◆ **MASIH KURANGNYA KOORDINASI, SINERGI DAN KONVERGENSI LINTAS OPD DALAM TPPS KABUPATEN;**
  - ◆ **PENYAMPAIAN DATA UNTUK PEMENUHAN 8 AKSI KONVERGENSI STUNTING YANG TERLAMBAT DISAMPAIKAN;**
  - ◆ **SATGAS KABUPATEN TIDAK MAKSIMAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DALAM MENDAMPINGI KABUPATEN;**
  - ◆ **BELUM ADA LAPORAN TERTULIS PELAKSANAAN KEGIATAN MASING-MASING OPD TERKAIT PADA TPPS KABUPATEN;**
  - ◆ **PERAN PKK BELUM MAKSIMAL DALAM PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING;**
  - ◆ **DATA CAPAIAN INDIKATOR ESSENSIAL DAN SUPPLY YANG MASIH RENDAH;**
  - ◆ **DIPERLUKAN INTERVENSI DAN INTEGRASI LINTAS SEKTORAL DALAM PENURUNAN STUNTING;**
  - ◆ **DATA YANG BELUM VALID (AKURAT, VALID DAN TEPAT WAKTU);**
  - ◆ **DIPERLUKAN PENDAMPINGAN/MONITORING DAN EVALUASI DALAM SETIAP PROGRAM KEGIATAN;**
  - ◆ **MEMPERKUAT KOLABORASI DALAM PENTAHELIX (OPD, MASYARAKAT, AKADEMISI, SWASTA, MEDIA);**
- ;

## **HAMBATAN ...**

- ◆ **PELAKSANAAN INTERVENSI/PELAKSANAAN PROGRAM BELUM OPTIMAL, SEHINGGA AKSES LAYANAN DARI SISI KELOMPOK PENERIMA MANFAAT TERBATAS;**
- ◆ **ADANYA PERBEDAAN METODE PENGUKURAN PREVALENSI STUNTING ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH ;**
- ◆ **TERBATASNYA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANA;**
- ◆ **KETERBATASAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

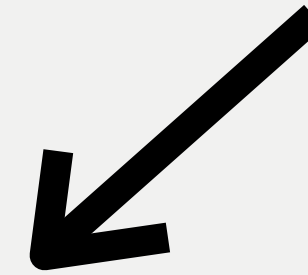


# **Strategi Dan Kebijakan dalam Pelaksanaan Koordinasi, Konvergensi Dan Perencanaan Percepatan Penurunan Stunting :**

- ◆ **PENGUATAN KELEMBAGAAN TPPS SECARA BERJENJANG MELALUI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS, RAPAT KOORDINASI, WEBINAR DAN KEGIATAN LAINNYA.**
- ◆ **RAPAT KOORDINASI RUTIN BERSAMA ANGGOTA TPPS KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK EVALUASI KEGIATAN DI Masing-Masing OPD TERKAIT;**
- ◆ **MEMASTIKAN PROGRAM RENCANA KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TERAKOMODIR PADA DOKUMEN RKPD, RENJA, KUAPPAS DAN APBD 2023.**
- ◆ **OPTIMALISASI MONITORING SISTEM MANAJEMEN DATA DAN PELAPORAN CAPAIAN INDIKATOR SEBAGAI BAHAN EVALUASI TARGET CAPAIAN DI AKHIR TAHUN.**
- ◆ **DIPERLUKAN KOMITMEN BERSAMA DAN LINTAS SEKTOR DALAM INTERVENSI DAN INTEGRASI DALAM PENURUNAN STUNTING .**
- ◆ **PEMBENTUKAN BAPAK ASUH ANAK STUNTING (SK – BERPROSES) DENGAN MELIBATKAN OPD DAN SELURUH STAKE HOLDER , CSR – CSR YG ADA.**
- ◆ **DIPERLUKAN PENDAMPINGAN/MONITORING DAN EVALUASI DALAM SETIAP PROGRAM KEGIATAN**
- ◆ **MENINGKATKAN ALOKASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TERKAIT INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF .**
- ◆ **PERLU ADANYA INOVASI – INOVASI DI OPD TERKAIT, DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.**
- ◆ **OPTIMALISASI PERAN PKK DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**
- ◆ **OPTIMALISASI PERAN SATGAS KABUPATEN DALAM MENDAMPINGI KABUPATEN.**
- ◆ **OPTIMALISASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**



# PROGRAM INOVASI



**MASGIBUR "GERAKAN MENTAWAI ANTI  
STUNTING DAN GIZI BURUK PEDULI ANAK"**



# TERIMA KASIH SURAK SABEU

